

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Muhsin, Laila Nafisah, Yunani Siswanti. *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground*, Ctk. Pertama, Deepublish Publisher, Sleman, 2019.
- Subekti dan R. Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, Ctk, Kesebelas, Pradya paramita, Jakarta, 1992.
- Seoraso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk, kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk, ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sri Sayekti, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Universitas Lampung, Lampung, 2000.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ki Sabdacarakamata, *Sejarah Keraton Yogyakarta*, Ctk. Pertama, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok, 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Tamaulina, Irmawati, Muhammad Sabir, dan Indara Tjahyadi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Ctk. Pertama, Saba Jaya Publisher, Karawang, 2024.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Ctk. Ketiga, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2013.
- James Yoseph Palenawan, *Hak-Hak Atas Tanah dan Kekayaan Alam*, Ctk. Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2024.
- J.J. Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Ctk. Pertama, Transmedia pustaka, Jakarta, 2010.

Jurnal

Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, 2014.

Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sultan Ground di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Jurnal Spirit Publik, Vol. 9, No. 1, 2014.

Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualaman (Recognition of Land Rights Owned by Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and Land Rights Owned by Kadipaten Pakualaman), Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1 No. 1, 2022.

Kraton Yogyakarta Tahun 1755-1816, Jurnal Pendidikan Sejarah, No. 1 Vol. 5, 2018.

Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsrgel), Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Vol.1 No. 2, 2024.

Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja dan Politik Wacana "Raja Perempuan", Indonesian Historical Studies, No. 1 Vol. 3, 2019.

Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, No. 1 Vol. 3, 2020.

Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya, Supremasi Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 3, 2021.

Hukum Tanah Adalah Hukum yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia di Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Jurnal Mitra Manajemen, No.2 Vol. 12, 2021.

Pelaksanaan Pemberian Hak Sewa Tanah untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kota Tangerang Selatan, Jurnal Hukum, 2016.

Internet

Aditya Madiastuti, “Ini Lho Perbedaan kapanewon, kemantren, dan kalurahan di Jogja, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/budaya/d-6826172/ini-lho-perbedaan-kapanewon-kemantren-dan-kalurahan-di-jogja>, diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2024.

Almidinah Putri Brilian, “Pengertian HGB dan Aturannya, terdapat dalam <https://www.detik.com/properti/berita/d-6816778/pengertian-hgb-dan-aturannya>, diakses terakhir tanggal 10 November 2024.

Wonokerto, “Sejarah Kalurahan Wonokerto”, <https://wonokertosid.slemankab.go.id/home/2017/01/31/sejarah-kalurahan-wonokerto/>, diakses terakhir tanggal 03 Februari 2025

Karin Christiana Basoeki, “Aspek Hukum Kepemilikan Rumah Berstatus ‘Magersari’”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-hukum-kepemilikan-rumah-berstatus-magersari--lt5fc5fde284670/>, diakses terakhir tanggal 06 November 2024.

Ridho Afriandedy, “Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, terdapat dalam <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>, diakses terakhir tanggal 18 Februari 2025.

Sigar Aji Poerana, “Prosedur Pengajuan Tanah Ulayat”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulyat-lt4f1654e73aad1/>, diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2024.

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses terakhir tanggal 5 Januari 2025.

Willa Wahyudi, “Perbedaan Hak Pakai dan Hak Milik”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hak-pakai-dan-hak-milik-lt6374c85eba1a1/>, diakses terakhir tanggal 10 November 2024.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.